

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM MENDUKUNG SDG 4 MELALUI PROFESIONALISME DAN KUALITAS PEMBELAJARAN: *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*

Surya Jaya Wardhana¹, Muhammad Syifa'ul Qulub², Indah Prabawati³, Wilda Sumarsyah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: 25040674001@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji keterkaitan kebijakan sertifikasi guru dengan peningkatan profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) 4. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada protokol PRISMA 2020. Literatur diperoleh melalui Google Scholar dengan menggunakan kata kunci “sertifikasi guru”, “profesionalisme guru”, dan “kualitas pembelajaran”. Artikel dipilih berdasarkan tahun publikasi, ketersediaan naskah lengkap, dan kesesuaian dengan topik penelitian. Proses seleksi dilakukan melalui penyaringan judul dan abstrak, kemudian dilanjutkan dengan penilaian kesesuaian isi artikel. Sebanyak 10 artikel dianalisis menggunakan analisis isi dan sintesis tematik. Hasil sintesis menunjukkan bahwa sertifikasi berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, terutama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan praktik pembelajaran. Namun, keterkaitan sertifikasi dengan hasil belajar siswa belum menunjukkan pola yang konsisten. Efektivitas implementasi juga berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, pelatihan berkelanjutan, kesejahteraan guru, dukungan kelembagaan, serta kondisi setiap daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi guru tidak cukup dipandang sebagai pemenuhan persyaratan administratif, tetapi perlu disertai pengembangan profesional secara berkelanjutan dan dukungan kelembagaan agar kompetensi yang diperoleh dapat diterapkan dalam pembelajaran. Dukungan tersebut dapat memperkuat kontribusi sertifikasi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan mendukung pencapaian SDG 4, khususnya Target 4.c.

Kata Kunci: Sertifikasi Guru, Profesionalisme Guru, Implementasi Kebijakan, Kualitas Pembelajaran, SDG 4.

Abstract

This study aims to examine the relationship between teacher certification policy and the improvement of teacher professionalism and learning quality in supporting the achievement of Sustainable Development Goal (SDG) 4. This research uses a Systematic Literature Review (SLR) method based on the PRISMA 2020 protocol. The literature was obtained through Google Scholar using the keywords “teacher certification,” “teacher professionalism,” and “learning quality.” Articles were selected based on publication year, availability of full-text manuscripts, and relevance to the research topic. The selection process involved screening titles and abstracts, followed by an assessment of the relevance of the article content. A total of 10 articles were analyzed using content analysis and thematic synthesis. The synthesis shows that teacher certification is related to improvements in teacher competence and professionalism, particularly in supporting the implementation of teaching tasks and learning practices. However, the relationship between teacher certification and student learning outcomes does not show a consistent pattern. The effectiveness of policy implementation is also related to the availability of facilities, continuous training, teacher welfare, institutional

support, and regional conditions. The findings indicate that teacher certification should not be viewed merely as an administrative requirement, but should be accompanied by continuous professional development and institutional support so that the competencies obtained can be applied in learning. Such support can strengthen the contribution of teacher certification to improving learning quality and supporting the achievement of SDG 4, particularly Target 4.c.

Keywords: *Teacher Certification, Teacher Professionalism, Policy Implementation, Learning Quality, SDG 4.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bidang strategis yang sangat penting bagi pembangunan nasional karena membantu meningkatkan standar sumber daya manusia. Seberapa jauh suatu negara berkembang sangat berkaitan dengan kualitas sistem pendidikannya. Seperti yang dinyatakan oleh Rahmi & Rassanjani (2025), *Sustainable Development Goals* (SDG) 4 merupakan salah satu tujuan pembangunan global yang menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua. Pencapaian tujuan tersebut tidak hanya bergantung pada akses terhadap pendidikan, tetapi juga pada ketersediaan guru yang berkualifikasi dan mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas. UNESCO & International Task Force on Teachers for Education (2024) melaporkan bahwa dunia masih menghadapi kekurangan sekitar 44 juta guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah hingga tahun 2030. Kekurangan tersebut dapat meningkatkan beban kerja guru dan berdampak pada kualitas pembelajaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan profesionalisme guru masih menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam upaya mencapai SDG 4.

Para pendidik memiliki peran penting dalam pengembangan dan implementasi proses pendidikan. Selain menyampaikan materi, para guru membentuk karakter dan kompetensi murid dengan berperan sebagai teladan, motivator, dan mentor. Menurut Mutiara et al. (2026) keberhasilan akademik siswa dipengaruhi oleh bagaimana para pendidik menjalankan tugasnya secara profesional. Menurut Hardiyati et al. (2026), kualitas dan profesionalisme guru, serta kualitas individu mereka, dipengaruhi oleh program pendidikan pemerintah, termasuk pengembangan kompetensi, metode evaluasi, dan dukungan kelembagaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme guru tidak hanya berkaitan dengan kemampuan dalam menjalankan tugas, tetapi juga dengan bagaimana kompetensi tersebut diterapkan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengembangan profesionalisme guru perlu didukung oleh kebijakan dan lingkungan pendidikan yang dapat membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran.

Guru dan dosen merupakan tenaga profesional berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang tersebut mengatur bahwa guru perlu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sebagai bagian dari persyaratan profesional. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru melalui kebijakan pendidikan. Kompetensi guru mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperlukan dalam menjalankan tugas pendidikan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005). Salah satu kebijakan yang berkaitan dengan upaya tersebut adalah sertifikasi guru. Program sertifikasi ditujukan untuk memberikan pengakuan terhadap profesionalitas guru dan mendukung peningkatan kualitas dalam menjalankan tugasnya. Namun, keberadaan kebijakan sertifikasi belum dapat langsung menunjukkan bahwa peningkatan profesionalisme guru selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pembelajaran.

Program sertifikasi guru merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru. Program ini berupaya memberikan

penghargaan atas pekerjaan guru sekaligus mendukung kemampuan yang diperlukan dalam menjalankan tugas pembelajaran. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru dan hasil pendidikan. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa sertifikasi guru belum selalu memberikan hasil seperti yang diharapkan dalam meningkatkan pembelajaran siswa (Kamal et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan kebijakan sertifikasi belum selalu sejalan dengan hasil yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pelaksanaan sertifikasi guru perlu dilihat tidak hanya dari tujuan kebijakannya, tetapi juga dari hasil yang muncul dalam praktik pendidikan.

Salah satu program pengembangan profesional guru (CPD) yang diselenggarakan pemerintah untuk meningkatkan keterampilan guru dan mendorong pembelajaran berkelanjutan adalah Pendidikan Profesi Guru (PPG) (Kurniadi, 2025). Menurut Mulyaningrum et al. (2025), pengembangan kompetensi guru juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pembelajaran di era digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan profesionalisme guru tidak berhenti pada sertifikasi, tetapi perlu dilanjutkan melalui pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Dalam penerapannya, kebijakan pendidikan juga menghadapi kondisi yang berbeda di setiap daerah. Perbedaan karakteristik wilayah dan dukungan yang tersedia dapat memengaruhi pelaksanaan program. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pengembangan guru perlu dilihat dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan di setiap daerah.

Kemampuan guru untuk meningkatkan profesionalismenya dalam pekerjaan dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan oleh Putri et al. (2025). Kebijakan pendidikan berkaitan dengan struktur, pelaksanaan, dan kesesuaian program yang dibuat pemerintah, sedangkan pengembangan kompetensi berkaitan dengan kemampuan guru dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan siswa yang terus berkembang. Peningkatan profesionalisme guru membutuhkan kebijakan yang mendukung dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Namun, hasil penelitian mengenai hubungan sertifikasi guru dengan kualitas pendidikan masih menunjukkan temuan yang beragam. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sintesis terhadap penelitian terdahulu untuk melihat bagaimana sertifikasi guru berkaitan dengan profesionalisme dan kualitas pembelajaran.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai evaluasi kebijakan pendidikan menjadi penting, terutama terhadap program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tetapi hasil pelaksanaannya belum selalu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi kebijakan dapat digunakan untuk melihat berbagai kendala dan kondisi yang muncul selama proses implementasi (Mulyadi et al., 2025). Meskipun sejumlah penelitian telah membahas sertifikasi guru, temuan yang tersedia masih menunjukkan hasil yang beragam. Sertifikasi lebih sering dikaitkan dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, sedangkan hubungannya dengan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa belum menunjukkan pola yang konsisten. Selain itu, faktor seperti fasilitas, pelatihan berkelanjutan, kesejahteraan guru, dan dukungan kelembagaan dapat memengaruhi bagaimana kompetensi setelah sertifikasi diterapkan dalam pembelajaran. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sintesis yang dapat memperjelas hubungan antara sertifikasi guru, profesionalisme, praktik pembelajaran, dan hasil belajar dalam perspektif implementasi kebijakan serta pencapaian SDG 4.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji temuan penelitian terdahulu secara lebih terpadu dengan menempatkan sertifikasi guru dalam kerangka implementasi kebijakan. Pembahasan tidak hanya melihat perubahan kompetensi setelah guru memperoleh sertifikat, tetapi juga memperhatikan kondisi yang memungkinkan kompetensi tersebut diterapkan dalam pembelajaran, seperti dukungan kelembagaan, pelatihan lanjutan, lingkungan kerja, dan kondisi pelaksanaan kebijakan. Hasil sintesis kemudian dikaitkan dengan SDG 4 untuk melihat peran sertifikasi dalam mendukung pengembangan profesional guru dan peningkatan kualitas

pendidikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara sertifikasi, kondisi implementasi, profesionalisme guru, dan praktik pembelajaran dalam mendukung pencapaian SDG 4.

Kajian ini dilakukan untuk memahami keterkaitan antara kebijakan sertifikasi guru, profesionalisme guru, dan kualitas pendidikan melalui pendekatan systematic literature review (SLR), termasuk hubungannya dengan pencapaian SDG 4. Penelitian ini menelaah berbagai hasil studi sebelumnya mengenai pelaksanaan sertifikasi guru serta kondisi yang dapat mendukung atau memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Temuan yang diperoleh diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun dan mengembangkan program sertifikasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan guru serta karakteristik pendidikan di berbagai daerah. Di samping itu, kajian ini diharapkan dapat memperkaya pembahasan dalam bidang administrasi publik, khususnya mengenai kebijakan pendidikan dan keterkaitan antara sertifikasi guru, pengembangan profesionalisme, serta kualitas pembelajaran.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan Pendidikan (Edwards III)

Istilah "kebijakan publik" merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial secara terorganisir, terarah, dan jangka panjang. Untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan yang ditetapkan, administrasi publik memandang kebijakan tidak hanya mencakup tahap perumusan tetapi juga proses implementasi dan evaluasi. Baik kualitas desain kebijakan maupun implementasinya yang konsisten di lapangan sangat penting bagi keberhasilan kebijakan tersebut. Menurut Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada empat hal, yaitu komunikasi yang baik, sumber daya yang cukup, sikap para pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung (Riau et al., 2024).



Gambar 1. Implementasi Kebijakan Edwards III (1980)

Pada Gambar 1, penjelasan keempat aspek tersebut digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan sertifikasi guru dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik kualitas perencanaan maupun kapasitas aktor kebijakan untuk menggabungkan pengelolaan berbagai bidang ini berdampak pada efektivitas kebijakan.

Untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas, kebijakan publik memiliki peran penting dalam membentuk dan mengarahkan sistem pendidikan di tingkat nasional. Kebijakan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Dalam pelaksanaannya, kebijakan yang telah dirancang perlu diterjemahkan secara konsisten ke dalam praktik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Perbedaan antara tujuan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan dapat memengaruhi hasil yang diperoleh. Karena itu, kebijakan pendidikan yang baik perlu disertai pelaksanaan yang sesuai agar dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan (Shahzad et al., 2023). Dalam konteks sertifikasi guru, hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan sertifikasi belum dengan sendirinya

menjamin perubahan dalam pembelajaran, karena hasilnya juga bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan bagaimana kompetensi guru digunakan dalam praktik.

Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia, masih terdapat beberapa kondisi yang dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan, seperti keterbatasan pendanaan, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, dan kesiapan pelaksana di lapangan (Hajar & Muhibin, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang telah dirumuskan, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam menjalankannya dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Dalam perspektif Edwards III, komunikasi dan sumber daya menjadi bagian penting dalam proses implementasi. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan pendidikan membutuhkan komunikasi yang jelas, dukungan sumber daya yang memadai, serta koordinasi antaraktor agar kebijakan dapat diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Model Implementasi Kebijakan (Van Meter & Van Horn)

Tidak ada satu kerangka teoretis pun yang dapat menjelaskan secara memadai efektivitas inisiatif kebijakan publik. Fokus Edwards III pada elemen internal seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi relevan, tetapi mungkin akan lebih bermanfaat jika menggunakan pendekatan lain yang mencakup lebih banyak aspek. Di sini, gagasan bahwa implementasi kebijakan adalah proses multifaset yang dipengaruhi oleh jaringan faktor yang saling terkait dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn (1975). Menurut konsep ini, isi kebijakan hanyalah salah satu faktor yang memengaruhi implementasi, faktor lain termasuk hubungan antar organisasi dan variabel lingkungan. Kebijakan dan tujuan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, sifat agen pelaksana, keadaan sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana adalah enam faktor utama yang memengaruhi implementasi kebijakan menurut kerangka teoretis mereka (Van Meter & Van Horn, 1975). Keberhasilan kebijakan ditentukan oleh interaksi dinamika internal dan eksternal, seperti yang ditunjukkan oleh keenam faktor ini, yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak linier.

Dalam pelaksanaan kebijakan, kejelasan mengenai tujuan dan standar yang hendak dicapai menjadi dasar bagi para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Ketersediaan sumber daya turut menentukan apakah kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, hubungan dan komunikasi antarorganisasi diperlukan agar koordinasi di antara pihak-pihak yang terlibat dapat berjalan secara efektif. Pelaksanaan kebijakan juga dipengaruhi oleh karakteristik organisasi pelaksana serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan kebijakan. Sikap pelaksana terhadap kebijakan menjadi unsur lain yang dapat memengaruhi penerapannya di lapangan (Van Meter & Van Horn, 1975). Jika diterapkan pada kebijakan sertifikasi guru, kerangka tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya persyaratan, tetapi juga dengan dukungan yang diperoleh guru dan kondisi tempat mereka bekerja. Sari et al. (2026) menunjukkan bahwa perkembangan profesional guru setelah sertifikasi berkaitan dengan dukungan pascasertifikasi, pendampingan, dan lingkungan sekolah. Dengan demikian, model Van Meter dan Van Horn dapat digunakan untuk memahami pelaksanaan sertifikasi guru dengan melihat keterkaitan antara kebijakan, kemampuan pelaksana, dukungan yang tersedia, dan kondisi lingkungan. Kerangka ini juga memperlihatkan bahwa peningkatan profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran tidak semata-mata ditentukan oleh sertifikasi, tetapi turut dipengaruhi oleh kondisi yang memungkinkan kompetensi guru diterapkan dalam praktik.

3. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru

Meningkatkan standar profesionalisme guru melalui kebijakan sertifikasi guru merupakan alat penting untuk meningkatkan standar pendidikan. Sertifikasi tidak hanya berkaitan dengan pemberian pengakuan formal kepada guru, tetapi juga menjadi bagian dari

upaya memastikan bahwa guru memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan profesinya. Dalam konteks Indonesia, Haesdhona et al. (2024) menunjukkan bahwa guru yang telah memperoleh sertifikasi memiliki kompetensi pedagogis, penguasaan materi, dan kemampuan pengelolaan kelas yang lebih baik dibandingkan guru yang belum bersertifikasi. Tinjauan berkelanjutan terhadap kinerja guru, serta proses perekrutan dan pelatihan, sangat penting untuk keberhasilan kebijakan tersebut.

Penggunaan sertifikasi guru di Indonesia juga menunjukkan dinamika yang beragam. Sertifikasi telah terbukti meningkatkan efektivitas dan kesejahteraan guru, yang pada gilirannya mengarah pada pembelajaran yang lebih baik (Mohzana & Zuana, 2025). Selain itu, sertifikasi dapat mendorong guru untuk lebih bertanggung jawab dan mengembangkan sikap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik (Sari et al., 2026). Namun, ada sejumlah masalah dengan implementasi kebijakan yang menyebabkan hasil yang kurang ideal. Ini termasuk pendanaan yang tidak mencukupi, pengawasan yang tidak efektif, dan variasi regional dalam keadaan. Oleh karena itu, kebijakan sertifikasi hanya akan efektif jika dirancang dengan baik, dan elemen-elemen yang berkaitan dengan pelaksanaannya harus selaras dengan kondisi dunia nyata agar kebijakan tersebut berhasil.

Dalam kajian ini, sertifikasi guru ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pendidikan yang bertujuan mengakui sekaligus mengembangkan kompetensi profesional guru. Kepemilikan sertifikat tidak dengan sendirinya mencerminkan tingkat profesionalisme, karena profesionalisme juga terlihat dari kemampuan guru menggunakan kompetensinya dalam menjalankan tugas dan melaksanakan pembelajaran. Dengan demikian, kualitas pembelajaran berkaitan dengan sejauh mana kompetensi tersebut diterapkan dalam praktik mengajar. Dampak sertifikasi terhadap pembelajaran juga tidak berlangsung secara otomatis, sebab penerapannya dapat dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan, ketersediaan sumber daya, kesempatan mengikuti pelatihan, dan kondisi lingkungan kerja. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan profesionalisme melalui sertifikasi diharapkan dapat mendorong perbaikan praktik pembelajaran yang pada akhirnya turut mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pencapaian SDG 4.

4. Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru

Regulasi dan penerapannya yang sebenarnya adalah dua faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan program sertifikasi guru. Menurut Edwards III, empat hal komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memengaruhi implementasi kebijakan yang efektif. Cara informasi tentang proses dan tujuan sertifikasi dikomunikasikan kepada pendidik adalah contoh komunikasi. Di sisi lain, sumber daya mencakup hal-hal seperti pendanaan, pendidikan, dan dukungan institusional yang kuat. Struktur birokrasi berkaitan dengan transparansi proses dan kerja sama antarlembaga, sementara disposisi menunjukkan pola pikir dan dedikasi para pelaksana kebijakan. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan mengenai sertifikasi guru bergantung pada keempat aspek yang saling terkait ini. Lihat Tabel 1 untuk rincian kerangka kerja teoretis yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi guru.

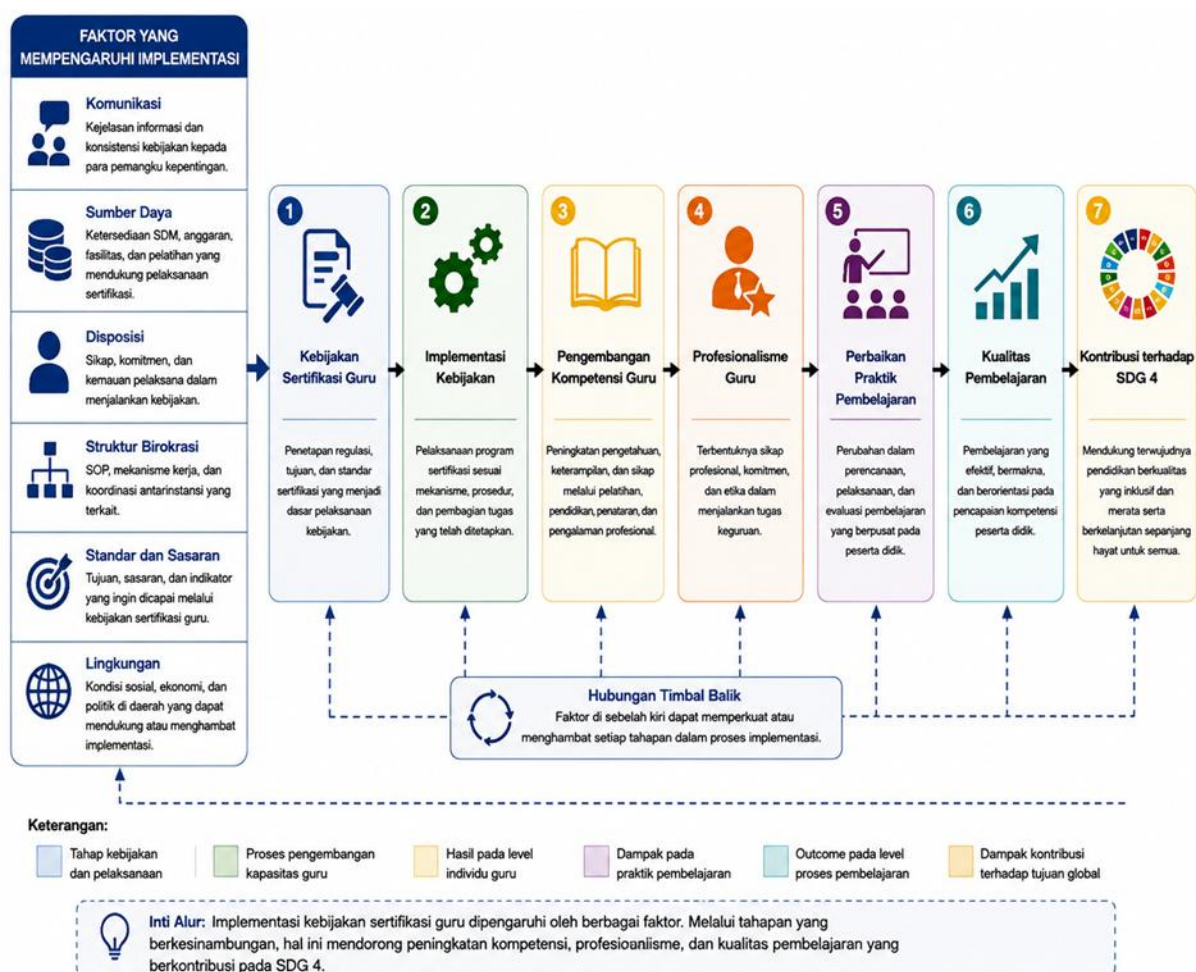
Tabel 1. Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru

No	Aspek Teori	Indikator	Implementasi dalam Sertifikasi Guru	Perspektif Teori
1	Komunikasi	Penyampaian informasi kebijakan	Informasi mengenai ketentuan, tahapan, dan tujuan sertifikasi dapat diterima serta dipahami oleh guru dan pihak yang terlibat.	Edwards III
2	Sumber Daya	Dukungan tenaga,	Pelaksanaan sertifikasi didukung oleh ketersediaan anggaran, tenaga	Edwards III

No	Aspek Teori	Indikator	Implementasi dalam Sertifikasi Guru	Perspektif Teori
		Pembiayaan, dan Fasilitas	pelaksana, fasilitas, serta kegiatan pengembangan kompetensi.	
3	Disposisi	Sikap dan komitmen pelaksana	Respons, kesediaan, dan komitmen guru maupun aparatur terkait dalam menjalankan ketentuan sertifikasi.	Edwards III
4	Struktur Birokrasi	Prosedur kerja dan Hubungan antarinstansi	Kejelasan mekanisme kerja, pembagian tugas, serta koordinasi antar pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sertifikasi.	Edwards III
5	Standar & Sasaran	Arah yang hendak dicapai melalui kebijakan	Pelaksanaan sertifikasi diarahkan pada penguatan kompetensi dan profesionalisme guru sesuai dengan tujuan kebijakan	Van Meter & Van Horn
6	Lingkungan	Sosial, ekonomi, politik	Karakteristik serta kondisi setiap daerah yang dapat menciptakan perbedaan dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi.	Van Meter & Van Horn

Berdasarkan Tabel 1, implementasi kebijakan sertifikasi guru tidak bergantung pada satu aspek saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Kejelasan informasi, dukungan sumber daya, komitmen pelaksana, mekanisme birokrasi, serta kondisi setiap daerah dapat memengaruhi jalannya kebijakan. Perbedaan pada faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan sertifikasi memberikan hasil yang berbeda antarwilayah. Dalam konteks ini, sertifikasi guru lebih tepat dipahami sebagai kebijakan yang dapat mendukung pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru, bukan sebagai jaminan langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Kompetensi dan profesionalisme yang berkembang melalui pelaksanaan kebijakan selanjutnya dapat memengaruhi cara guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Dengan demikian, hubungan antara sertifikasi dan kualitas pembelajaran berlangsung secara bertahap serta dipengaruhi oleh kondisi implementasi kebijakan.

Temuan dari beberapa penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru dapat memberikan hasil yang berbeda antarwilayah. Haesdhona et al. (2024) menemukan bahwa guru bersertifikasi memiliki kompetensi pedagogis, penguasaan materi, dan kemampuan pengelolaan kelas yang lebih baik, meskipun peningkatan tersebut belum selalu diikuti oleh hasil belajar siswa yang sebanding. Sari et al. (2026) menunjukkan bahwa sertifikasi berkaitan dengan penguatan identitas profesional, rasa percaya diri, dan komitmen guru, sedangkan Mohzana & Zuana (2025) menemukan perubahan pada kinerja dan kesejahteraan guru setelah sertifikasi. Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat sertifikasi lebih terlihat pada kompetensi dan kondisi profesional guru, sementara dampaknya terhadap hasil belajar masih dipengaruhi oleh dukungan dan kondisi lingkungan pelaksanaannya.



Gambar 2. Alur Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru

Gambar 2 menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi guru memiliki keterkaitan dengan pencapaian SDG 4 melalui proses yang tidak berlangsung secara langsung. Keterkaitan tersebut berlangsung melalui proses pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru yang kemudian diterapkan dalam praktik pembelajaran. Ketika kompetensi dan profesionalisme tersebut didukung oleh pelaksanaan kebijakan yang memadai, guru memiliki peluang yang lebih besar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih berkualitas bagi peserta didik. Dengan demikian, kebijakan sertifikasi guru dapat dipandang sebagai salah satu instrumen kebijakan yang berpotensi mendukung pencapaian SDG 4 melalui peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini sejalan dengan Rahmi & Rasanjani (2025) yang menempatkan kebijakan publik di bidang pendidikan sebagai salah satu bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

C. METODE

1. Pendekatan dan Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji keterkaitan antara sertifikasi guru, profesionalisme, dan kualitas pembelajaran. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi, menyeleksi, dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai fenomena yang dikaji.

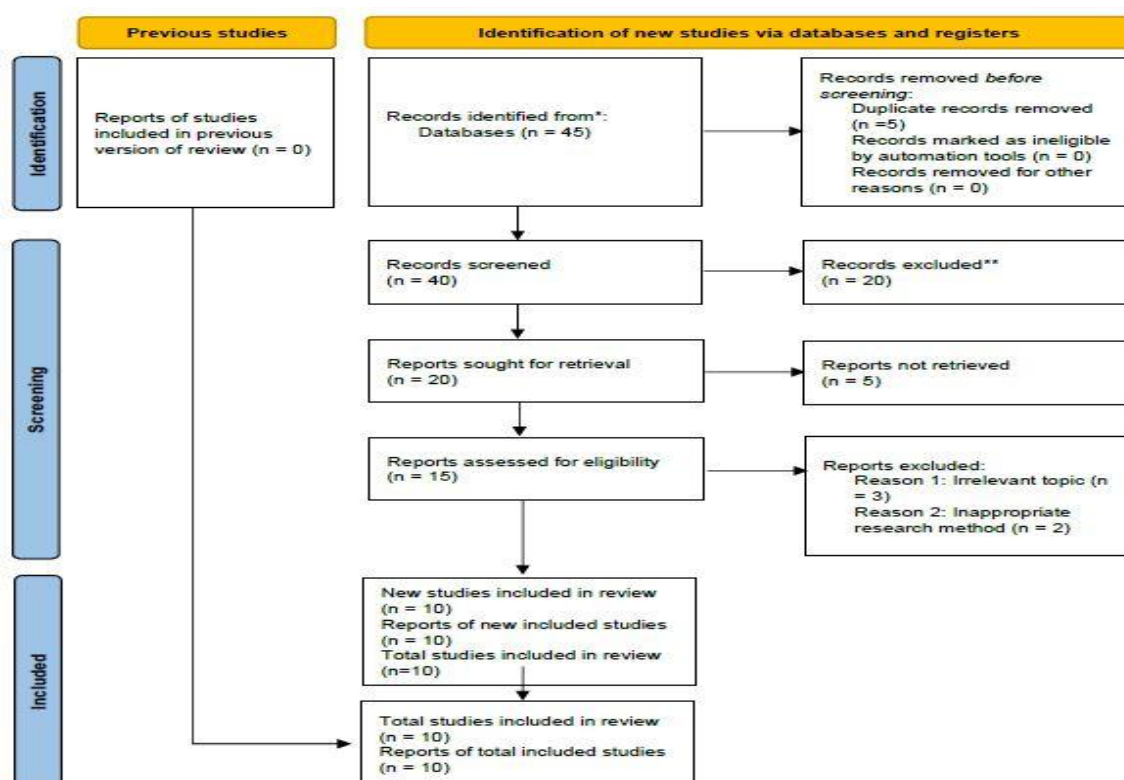
Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) sebagai metode untuk mengumpulkan dan meninjau literatur secara sistematis. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan mensintesis berbagai hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji. Proses kajian dilakukan secara terstruktur dengan mengacu

pada protokol PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu sertifikasi guru, profesionalisme guru, dan kualitas pembelajaran, dengan melihat keterkaitan ketiganya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Artikel jurnal ilmiah merupakan sumber data utama untuk penelitian ini, yang didasarkan pada pencarian yang dilakukan menggunakan Google Scholar. Platform ini dipilih karena jangkauannya yang luas ke jurnal ilmiah nasional dan internasional, menawarkan banyak materi yang relevan. Dalam pemilihan artikel, penelitian ini mempertimbangkan tahun publikasi, ketersediaan manuskrip lengkap, dan kesesuaian topik.

Kata kunci termasuk "sertifikasi guru," "profesionalisme guru," dan "kualitas pembelajaran" digunakan untuk mengumpulkan data dalam studi dokumentasi. Untuk menemukan makalah yang relevan dengan penelitian, pencarian dilakukan secara bertahap. Penyaringan judul dan abstrak, diikuti oleh penilaian kesesuaian konten, adalah langkah pertama dalam memilih artikel yang ditemukan. Untuk menjamin pendekatan yang metodis dan transparan pada setiap langkah proses seleksi, penelitian ini mengacu pada protokol PRISMA 2020 (Page et al., 2021).



Gambar 3. Diagram Alir PRISMA Proses Seleksi Artikel

Data dievaluasi menggunakan metode analisis konten yang dipadukan dengan sintesis topik, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3, ketika artikel yang sesuai diperoleh. Para peneliti mengekstrak ide-ide utama artikel dan mengorganisasikannya berdasarkan karakteristik yang sama dan unik. Langkah selanjutnya adalah membandingkan hasil penelitian yang berbeda untuk menemukan tren dan perbedaan. Penelitian ini mampu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara kebijakan pendidikan, sertifikasi guru, dan praktik profesional untuk meningkatkan prestasi siswa.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sertifikasi Guru dalam Mendukung SDG 4

Dalam konteks pembangunan pendidikan global, SDG 4 menekankan pentingnya memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Pencapaian tujuan tersebut berkaitan erat dengan ketersediaan guru yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang memadai. Target SDG 4.c secara khusus menekankan pentingnya meningkatkan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi serta memperoleh pengembangan profesional yang sesuai (UNESCO & International Task Force on Teachers for Education, 2024). Dalam konteks tersebut, guru tidak hanya berperan sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai salah satu aktor penting dalam menentukan kualitas pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, kebijakan sertifikasi guru dapat dipahami sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru. Namun, peningkatan kompetensi melalui sertifikasi tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan kualitas pembelajaran, karena manfaatnya tetap bergantung pada bagaimana kompetensi tersebut diterapkan dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil sintesis terhadap sepuluh artikel yang diseleksi melalui proses PRISMA, sertifikasi guru cenderung memberikan perubahan yang lebih terlihat pada aspek profesional dan kinerja guru. Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa status sertifikasi berkaitan dengan perkembangan kapasitas guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Sembiring et al. (2022) menemukan adanya keterkaitan antara sertifikasi, kepuasan kerja, dan kinerja guru, sedangkan Priyono et al. (2024) menunjukkan bahwa sertifikasi profesional memiliki hubungan positif dengan kinerja guru. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa manfaat sertifikasi relatif lebih jelas pada aspek yang berkaitan langsung dengan guru sebagai pelaksana pembelajaran. Namun, pola yang berbeda terlihat ketika dampaknya dikaitkan dengan hasil pendidikan siswa. Hansen & Johansson (2026) menemukan adanya hubungan antara sertifikasi formal dan capaian pendidikan siswa, sedangkan Lucksnat et al. (2024) tidak menemukan perbedaan kualitas pengajaran yang jelas berdasarkan jalur sertifikasi. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi tidak dapat dipandang sebagai faktor tunggal yang secara otomatis menentukan kualitas pembelajaran maupun pencapaian siswa. Dampaknya masih berkaitan dengan bagaimana kompetensi guru digunakan dalam pembelajaran serta kondisi yang menyertai penerapan kebijakan di lingkungan pendidikan.

Sertifikasi menunjukkan pengaruh terhadap perkembangan guru, tetapi hasil penerapannya belum tentu sama pada setiap lingkungan pendidikan. Perbedaan tersebut berkaitan dengan kondisi yang menyertai pelaksanaan kebijakan. Temuan mengenai kualitas pengajaran dan kinerja guru menunjukkan bahwa keberadaan sertifikasi tidak bekerja sebagai satu-satunya faktor yang menentukan perubahan dalam pembelajaran. Dalam konteks Indonesia, Bismo et al. (2024) menunjukkan bahwa manfaat sertifikasi terhadap kesejahteraan guru masih berkaitan dengan kondisi struktural dan status kepegawaian. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi yang diperoleh melalui sertifikasi membutuhkan dukungan lingkungan kerja dan kelembagaan agar dapat diterapkan secara optimal dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, perbedaan hasil sertifikasi perlu dipahami tidak hanya dari sertifikasi yang diperoleh guru, tetapi juga dari kondisi yang memungkinkan kompetensi tersebut diterapkan secara berkelanjutan.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan sertifikasi guru dan kondisi pelaksanaannya di lapangan. Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh bagaimana kebijakan dirancang, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam menerapkannya serta dukungan yang tersedia dalam lingkungan pendidikan. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Van Meter & Van Horn (1975) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik pelaksana, sumber daya, serta lingkungan yang melingkupi proses implementasi. Dalam konteks sertifikasi guru, peningkatan kompetensi

tidak cukup apabila guru tidak memperoleh kondisi yang memungkinkan kemampuan tersebut digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Karena itu, sertifikasi sebaiknya tidak dipandang sebagai tahap akhir dari pengembangan profesional guru. Kebijakan ini perlu disertai dengan pemantauan kinerja, supervisi akademik, serta kesempatan bagi guru untuk terus mengembangkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

Jika dilihat secara keseluruhan, sertifikasi guru belum dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan ini dapat membantu memperkuat kompetensi dan profesionalisme guru, tetapi manfaatnya sangat bergantung pada dukungan yang diterima setelah sertifikasi diperoleh. Karena itu, pengembangan profesional guru perlu berlangsung secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada pemberian sertifikat. Dalam kaitannya dengan SDG 4, UNESCO & International Task Force on Teachers for Education (2024) menekankan pentingnya guru yang berkualifikasi, memperoleh dukungan yang memadai, serta memiliki kesempatan untuk terus mengembangkan kemampuan profesionalnya. Dengan demikian, sertifikasi dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan apabila disertai dengan pengembangan profesional, dukungan lingkungan kerja, dan kesempatan bagi guru untuk menerapkan serta memperbarui kompetensinya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

2. Dampak Sertifikasi Guru terhadap Kualitas Pembelajaran

Perubahan yang berkaitan dengan sertifikasi tidak hanya terlihat pada aspek profesional guru, tetapi juga pada cara guru mengembangkan praktik pembelajaran di kelas. Hasil sintesis terhadap sepuluh artikel menunjukkan bahwa perubahan pada kapasitas dan profesionalisme guru cenderung lebih konsisten, sedangkan keterkaitannya dengan hasil belajar siswa masih menunjukkan variasi antarkonteks. Mohzana & Zuana (2025) menunjukkan adanya keterkaitan sertifikasi dengan kinerja guru dan pencapaian pembelajaran, sementara Sari et al. (2026) memperlihatkan bahwa sertifikasi dapat mendorong refleksi profesional, pengembangan diri, serta penyesuaian praktik pembelajaran. Namun, perubahan tersebut tidak selalu berkembang menjadi inovasi pembelajaran yang berkelanjutan karena guru masih menghadapi keterbatasan dukungan setelah sertifikasi, termasuk kebutuhan akan mentoring, pengembangan pedagogi digital, dan dukungan kelembagaan. Dengan demikian, sertifikasi lebih tepat dipahami sebagai bagian dari proses pengembangan profesional guru daripada sebagai hasil akhir yang dengan sendirinya menjamin perubahan kualitas pembelajaran.

Sertifikasi guru dapat diikuti oleh perubahan dalam cara guru merancang dan menjalankan pembelajaran. Dalam praktiknya, perubahan tersebut dapat tercermin dari upaya menyesuaikan kegiatan belajar dengan kebutuhan peserta didik, penggunaan pendekatan yang lebih berpusat pada siswa, serta pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari proses pembelajaran. Sari et al. (2026) menunjukkan bahwa pengalaman sertifikasi dapat mendorong guru untuk meninjau kembali praktik profesional yang selama ini dilakukan dan mempertimbangkan cara mengajar yang lebih adaptif, termasuk melalui penggunaan teknologi dan pendekatan yang memberi ruang lebih besar bagi keterlibatan peserta didik. Meskipun demikian, perubahan dalam praktik pembelajaran tidak selalu berlangsung secara optimal. Ketersediaan dukungan kelembagaan, kesempatan memperoleh pendampingan, dan kesiapan guru untuk mengembangkan kompetensinya setelah sertifikasi turut memengaruhi keberlanjutan perubahan tersebut. Oleh sebab itu, sertifikasi dapat menjadi salah satu pemicu perkembangan praktik pembelajaran, tetapi hasilnya tetap membutuhkan lingkungan sekolah yang mendukung proses pengembangan profesional guru secara berkelanjutan.

Sebaliknya, tidak semua hasil menunjukkan kecenderungan yang sama. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dampak sertifikasi terhadap kualitas pendidikan masih bervariasi, terutama ketika dilihat dari perubahan hasil belajar siswa. Meskipun kompetensi guru cenderung mengalami peningkatan setelah sertifikasi, perubahan tersebut belum selalu

diikuti oleh hasil belajar siswa yang lebih tinggi dalam setiap konteks. Guo & Tian (2026) menunjukkan bahwa sertifikasi dapat berkaitan dengan pencapaian siswa melalui peningkatan efikasi diri guru dan inovasi pedagogis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi saja tidak cukup untuk menjamin pembelajaran yang efektif karena penerapannya juga dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung guru dalam melaksanakan kompetensinya. Untuk membantu memberikan perspektif, berikut adalah ringkasan dari 10 temuan penelitian tersebut.

Tabel 2. Sintesis Temuan Sertifikasi Guru terhadap Praktik Pembelajaran

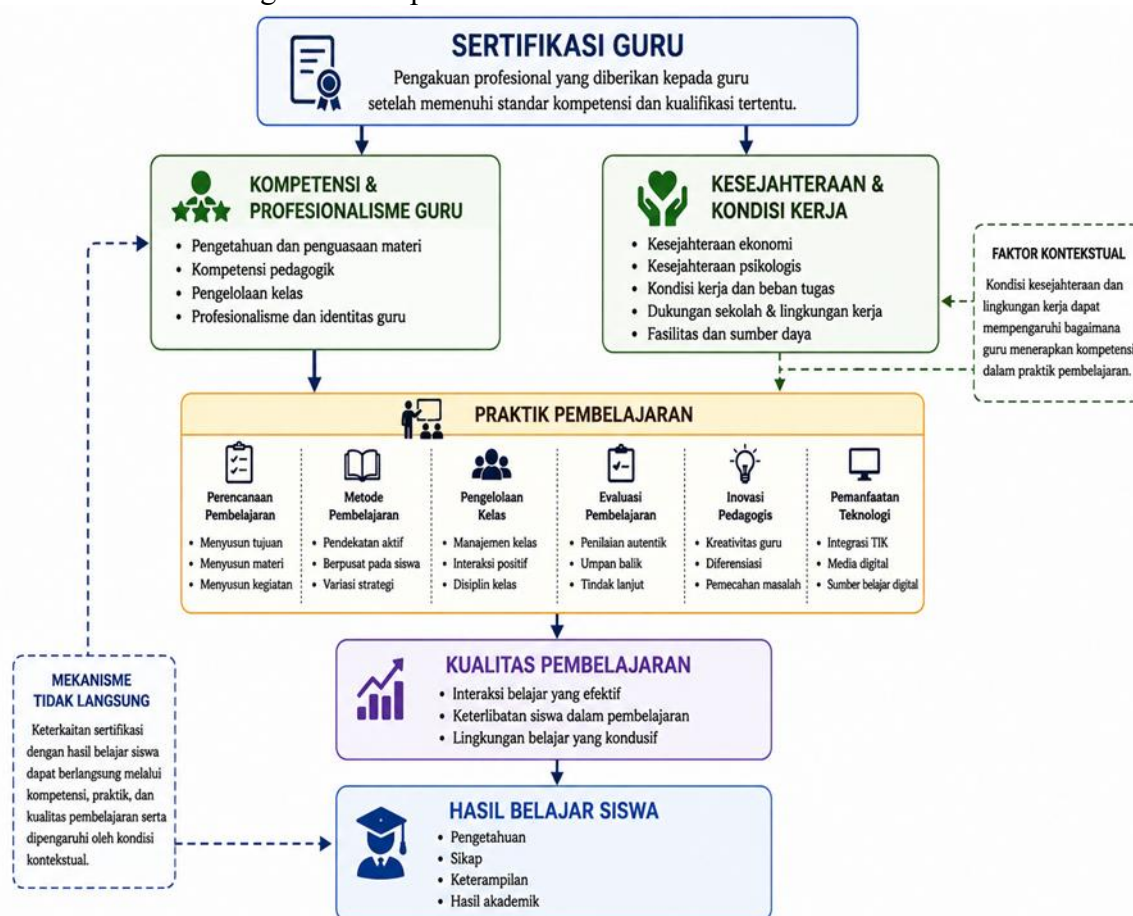
No	Aspek yang Dikaji	Pola Temuan
1	Kompetensi guru	Sertifikasi berkaitan dengan perkembangan kemampuan pedagogis, penguasaan materi, dan kapasitas guru dalam menjalankan tugas pembelajaran.
2	Perencanaan pembelajaran	Terdapat kecenderungan guru melakukan penyesuaian rancangan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik.
3	Metode pembelajaran	Praktik mengajar cenderung berkembang melalui penggunaan pendekatan yang lebih aktif, beragam, dan berorientasi pada keterlibatan siswa.
4	Pengelolaan kelas	Kemampuan guru dalam mengatur proses dan lingkungan belajar menunjukkan perkembangan setelah memperoleh sertifikasi.
5	Evaluasi pembelajaran	Sertifikasi berkaitan dengan upaya guru mengembangkan pelaksanaan evaluasi yang lebih sesuai dengan proses dan tujuan pembelajaran.
6	Profesionalisme guru	Perkembangan terlihat pada identitas profesional, refleksi terhadap praktik mengajar, serta dorongan untuk melakukan pengembangan diri.
7	Inovasi pedagogis	Sertifikasi dapat mendorong pengembangan praktik pembelajaran yang inovatif, meskipun keberlanjutannya bergantung pada dukungan yang tersedia.
8	Hasil belajar siswa	Sebagian penelitian menemukan kecenderungan positif, tetapi pengaruh terhadap capaian siswa belum menunjukkan pola yang konsisten.
9	Pemanfaatan teknologi	Penggunaan teknologi dalam pembelajaran mulai berkembang, tetapi penerapannya tetap dipengaruhi oleh kesiapan dan dukungan lingkungan sekolah.
10	Kondisi implementasi	Hasil sertifikasi turut dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan, fasilitas, kesempatan pengembangan profesional, dan lingkungan kerja guru.

Hasil sintesis pada Tabel 2 menunjukkan bahwa perubahan yang lebih terlihat setelah sertifikasi berkaitan dengan kompetensi dan profesionalisme guru. Sementara itu, hubungan sertifikasi dengan hasil belajar siswa masih menunjukkan temuan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan guru setelah sertifikasi belum tentu langsung menghasilkan peningkatan capaian belajar siswa. Guo & Tian (2026) menunjukkan bahwa hubungan tersebut dapat terjadi melalui peningkatan efikasi diri guru dan inovasi dalam pembelajaran. Dengan demikian, sertifikasi tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menjelaskan perubahan hasil belajar, karena kompetensi yang diperoleh guru masih

perlu diterapkan dalam pembelajaran dan didukung oleh kondisi yang memungkinkan proses tersebut berjalan dengan baik.

Selain kompetensi dan praktik pembelajaran, kesejahteraan guru juga perlu diperhatikan karena berkaitan dengan keberlanjutan manfaat sertifikasi. Kondisi kerja yang dihadapi guru dapat memengaruhi keberlangsungan kinerja profesional mereka. Bismo et al. (2024) menunjukkan bahwa sertifikasi melalui tunjangan profesi berkaitan dengan kesejahteraan guru di Indonesia. Namun, manfaat tersebut belum dirasakan secara merata karena masih dipengaruhi oleh status kepegawaian, kondisi struktural, dan perbedaan pendapatan antarguru. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat sertifikasi juga berkaitan dengan kondisi kerja guru. Kompetensi yang diperoleh melalui sertifikasi akan lebih memungkinkan untuk dipertahankan dan diterapkan apabila guru memperoleh dukungan serta lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan tugas profesionalnya.

Temuan tersebut membantu menjelaskan mengapa perubahan setelah sertifikasi lebih sering terlihat pada kompetensi dan profesionalisme guru, sedangkan hubungannya dengan hasil belajar siswa masih menunjukkan hasil yang beragam. Peningkatan kemampuan profesional guru tidak selalu langsung tercermin dalam capaian belajar siswa karena kompetensi tersebut masih perlu diterapkan melalui praktik pembelajaran yang didukung oleh kondisi kerja, kesejahteraan, dan dukungan kelembagaan. Dengan demikian, hubungan antara sertifikasi, kompetensi guru, kondisi kerja, praktik pembelajaran, dan hasil belajar siswa berlangsung melalui beberapa tahapan dan tidak bersifat langsung. Keterkaitan antarkomponen tersebut kemudian digambarkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Gambaran Konseptual Hubungan Sertifikasi Guru, Kompetensi, Kondisi Kerja, Praktik Pembelajaran, dan Hasil Belajar Siswa

Gambar 4 menunjukkan bahwa keterkaitan sertifikasi dengan hasil belajar siswa berlangsung melalui beberapa proses yang saling berhubungan. Sertifikasi dapat mendukung perkembangan kompetensi dan profesionalisme guru, tetapi kemampuan tersebut perlu diwujudkan melalui praktik pembelajaran agar dapat memberikan manfaat bagi peserta didik. Penerapan kompetensi tersebut juga dipengaruhi oleh kesejahteraan guru, kondisi kerja, serta dukungan yang tersedia di lingkungan sekolah. Dengan demikian, keberhasilan sertifikasi dalam mendukung hasil belajar tidak hanya bergantung pada diperolehnya sertifikat, tetapi juga pada kemampuan guru menerapkan kompetensinya dalam pembelajaran serta kondisi yang mendukung proses tersebut.

Temuan dalam sintesis ini menunjukkan bahwa manfaat sertifikasi tidak hanya berkaitan dengan kompetensi profesional, tetapi juga dengan kondisi yang menyertai guru dalam menjalankan tugasnya. Sembiring et al. (2022) menunjukkan keterkaitan sertifikasi dengan kepuasan kerja dan kinerja guru, sedangkan Bismo et al. (2024) menunjukkan bahwa manfaat sertifikasi juga berkaitan dengan kesejahteraan dan status kepegawaian. Pada sisi lain, Guo & Tian (2026) menemukan bahwa hubungan sertifikasi dengan capaian siswa dapat berlangsung melalui efikasi diri guru dan inovasi pedagogis. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kompetensi yang berkembang setelah sertifikasi perlu didukung oleh kondisi kerja dan diterapkan dalam pembelajaran agar dapat memberikan manfaat bagi siswa. Dengan demikian, dampak sertifikasi terhadap hasil pendidikan tidak hanya bergantung pada sertifikat yang diperoleh, tetapi juga pada proses dan kondisi yang menyertai penerapannya.

Jika dilihat dari hubungan sertifikasi dengan hasil belajar siswa, peningkatan kompetensi guru menjadi salah satu bagian penting dalam proses tersebut. Sertifikasi dapat membantu mengembangkan kemampuan dan profesionalisme guru, tetapi peningkatan tersebut belum tentu langsung terlihat pada hasil belajar siswa. Kompetensi yang diperoleh guru perlu diterapkan dalam pembelajaran dan didukung oleh kondisi sekolah, dukungan kelembagaan, kesejahteraan, serta lingkungan kerja yang memadai. Guo & Tian (2026) menunjukkan bahwa sertifikasi dapat berkaitan dengan capaian siswa melalui efikasi diri guru dan inovasi pedagogis. Sebaliknya, Lucksnat et al. (2024) tidak menemukan perbedaan kualitas pengajaran yang jelas berdasarkan jalur sertifikasi. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi tidak dengan sendirinya menentukan hasil belajar siswa. Dampaknya juga bergantung pada bagaimana guru menerapkan kompetensinya dalam pembelajaran dan dukungan yang tersedia di lingkungan sekolah.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Sertifikasi Guru

Berdasarkan kajian terhadap sepuluh artikel yang telah dianalisis, keberhasilan sertifikasi guru tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga oleh kondisi ketika kebijakan tersebut diterapkan. Temuan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa dampak sertifikasi belum selalu sama pada setiap konteks. Karena itu, pelaksanaan sertifikasi perlu dilihat dari faktor-faktor yang dapat membantu atau menghambat guru dalam menerapkan kompetensi yang diperoleh. Dukungan sekolah, kesempatan untuk mengikuti pengembangan profesional, dan kondisi kerja menjadi beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mohzana & Zuana (2025) menunjukkan adanya perkembangan pada kinerja dan kondisi profesional guru setelah sertifikasi. Namun, perubahan tersebut tetap membutuhkan lingkungan kerja yang mendukung agar kompetensi guru dapat digunakan dan dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran.

Di sisi lain, penerapan sertifikasi guru masih menghadapi beberapa kendala yang dapat menghambat penggunaan kompetensi guru dalam pembelajaran. Keterbatasan fasilitas dan dukungan setelah sertifikasi dapat membuat kemampuan yang telah diperoleh guru belum sepenuhnya digunakan dalam kegiatan belajar. Sari et al. (2026) menunjukkan bahwa guru masih mengalami kesulitan ketika menerapkan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa

dan menggunakan teknologi, terutama ketika pendampingan setelah sertifikasi dan kesiapan digital belum memadai. Kendala lain berkaitan dengan motivasi dan kondisi kerja guru. Priyono et al. (2024) menemukan bahwa sertifikasi dan motivasi kerja berhubungan positif dengan kinerja guru, sehingga rendahnya dukungan terhadap motivasi dapat menjadi persoalan dalam menjalankan tugas profesional. Bismo et al. (2024) juga menunjukkan bahwa kesejahteraan dan status kepegawaian masih berkaitan dengan kondisi yang dihadapi guru dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi. Dengan demikian, hambatan implementasi tidak hanya berasal dari keterbatasan sarana, tetapi juga dari kondisi yang memengaruhi guru dalam menjalankan kompetensinya. Berbagai faktor tersebut selanjutnya dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Sintesis Temuan dan Faktor yang Memengaruhi Implementasi Sertifikasi Guru

No	Faktor/Tema	Temuan Sintesis	Sumber
1	Pengembangan profesional	Sertifikasi berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan pengembangan profesional guru	Sari et al. (2026); Haesdhona et al. (2024); Mohzana & Zuana (2025)
2	Motivasi dan kinerja	Sertifikasi dan motivasi guru berkaitan dengan peningkatan kinerja serta kondisi profesional guru	Sembiring et al. (2022); Priyono et al. (2024); Mohzana & Zuana (2025)
3	Kesejahteraan dan kondisi kerja	Manfaat sertifikasi terhadap kesejahteraan guru masih dipengaruhi status kepegawaian dan kondisi struktural	Bismo et al. (2024)
4	Efikasi diri dan inovasi	Sertifikasi dapat mendukung capaian siswa melalui peningkatan efikasi diri dan inovasi pedagogis guru	Guo & Tian (2026)
5	Praktik dan kualitas pembelajaran	Sertifikasi dapat berkaitan dengan perubahan praktik pembelajaran, tetapi kualitas pengajaran tidak selalu berbeda berdasarkan jalur sertifikasi	Haesdhona et al. (2024); Lucksnat et al. (2024)
6	Hasil belajar siswa	Hubungan sertifikasi dengan hasil belajar menunjukkan kecenderungan positif pada sebagian penelitian, tetapi belum konsisten pada semua konteks	Hansen & Johansson (2026); Mohzana & Zuana (2025); Guo & Tian (2026); Lucksnat et al. (2024)
7	Kondisi implementasi	Dampak sertifikasi dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan, fasilitas, pendampingan, dan kondisi lingkungan pelaksanaan	Haesdhona et al. (2024); Sari et al. (2026); Kamal et al. (2024)

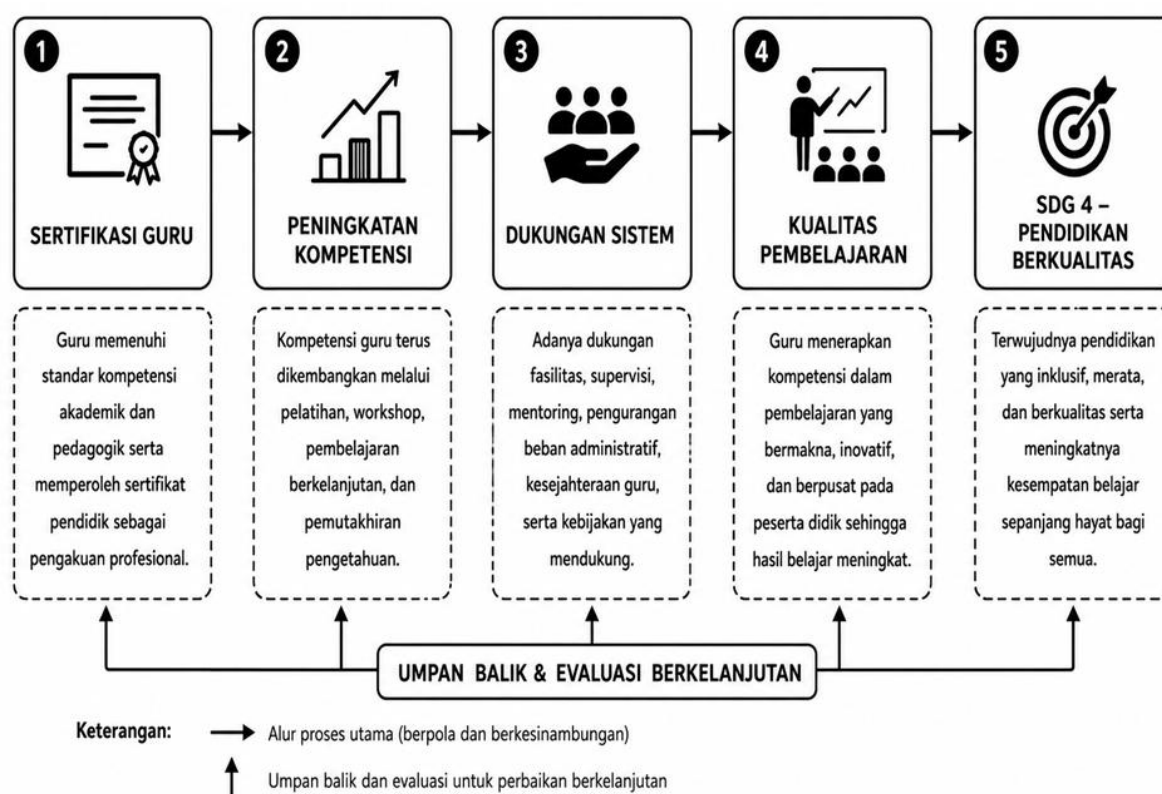
Berdasarkan Tabel 3, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru dipengaruhi oleh sejumlah kondisi yang saling berkaitan. Sertifikasi terlihat berkaitan dengan perkembangan profesional, motivasi, dan kinerja guru, tetapi manfaat tersebut belum selalu diikuti oleh perubahan yang sama pada kualitas pembelajaran maupun hasil belajar siswa. Kondisi kesejahteraan, status kepegawaian, lingkungan kerja, serta kemampuan guru dalam menerapkan kompetensi setelah sertifikasi turut memengaruhi hasil pelaksanaannya. Guo & Tian (2026) menunjukkan bahwa sertifikasi dapat berhubungan dengan capaian siswa melalui efikasi diri dan inovasi pedagogis, sementara Lucksnat et al. (2024) tidak menemukan perbedaan kualitas pengajaran yang jelas berdasarkan jalur sertifikasi. Kamal et al. (2024) juga menunjukkan bahwa keberhasilan sertifikasi perlu dilihat dari kondisi lingkungan dan proses

pelaksanaannya. Dengan demikian, perbedaan hasil antarpelitian menunjukkan bahwa keberhasilan sertifikasi tidak hanya bergantung pada kepemilikan sertifikat, tetapi juga pada kondisi yang memungkinkan guru menerapkan kompetensinya dalam proses pembelajaran.

Dari sudut pandang kebijakan publik, temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi guru dipengaruhi oleh kondisi yang menyertai proses pelaksanaannya. Van Meter & Van Horn (1975) menempatkan standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarlembaga, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana sebagai bagian yang memengaruhi kinerja implementasi. Sementara itu, Riau et al. (2024), dengan mengacu pada Edwards III (1980), menjelaskan empat aspek utama dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kedua perspektif tersebut membantu menjelaskan bahwa sertifikasi guru tidak cukup dilihat sebagai proses administratif, karena keberhasilannya juga bergantung pada kondisi organisasi dan lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan. Oleh karena itu, kebijakan sertifikasi perlu disertai dukungan yang memungkinkan guru mengembangkan dan menerapkan kompetensinya secara berkelanjutan. Dengan cara tersebut, sertifikasi tidak hanya menjadi pemenuhan persyaratan profesional, tetapi juga dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pencapaian SDG 4.

4. Strategi Peningkatan Efektivitas Sertifikasi Guru dalam Mendukung SDG 4

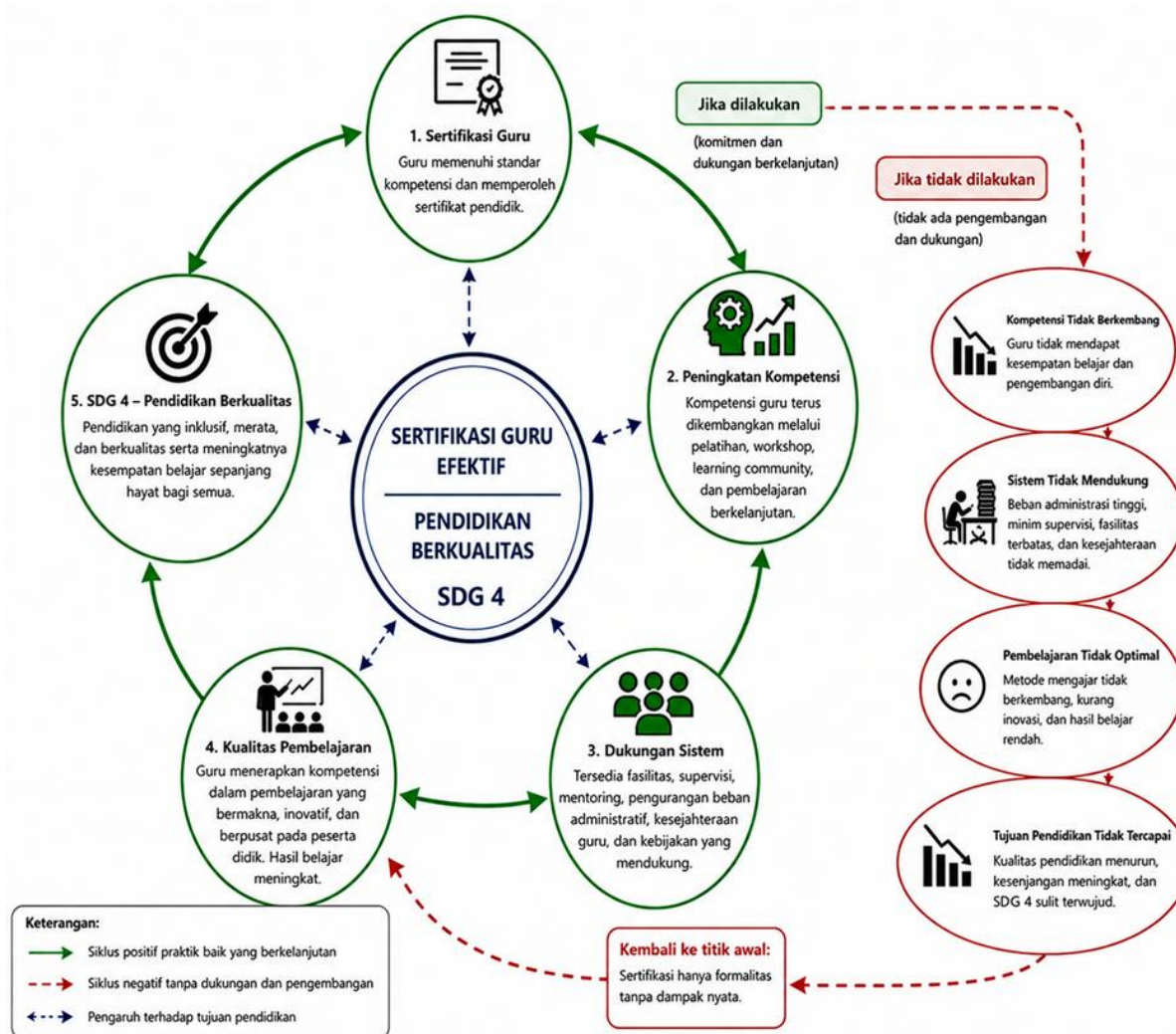
Bukti dari bagian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru masih menghadapi beberapa kendala yang dapat memengaruhi hasil kebijakan di lapangan. Karena itu, peningkatan efektivitas sertifikasi tidak cukup dilakukan melalui pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana kompetensi guru dikembangkan dan digunakan dalam pembelajaran. Kemampuan yang diperoleh setelah sertifikasi perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan perubahan dalam proses pendidikan. Hal ini membutuhkan dukungan dari lembaga pendidikan serta kesiapan guru untuk menerapkan dan mengembangkan kompetensinya dalam kegiatan belajar. Dengan cara tersebut, sertifikasi tidak hanya berfungsi sebagai bukti pemenuhan kualifikasi profesional, tetapi juga dapat diarahkan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Hubungan antara strategi tersebut dan peningkatan kualitas pembelajaran kemudian digambarkan dalam model berikut:



Gambar 5. Model Strategi Peningkatan Efektivitas Sertifikasi Guru

Berdasarkan Gambar 5, peningkatan kompetensi guru tidak berhenti setelah sertifikat diperoleh, tetapi perlu terus dikembangkan sesuai dengan perubahan kebutuhan pembelajaran. Sertifikasi akan lebih berpengaruh terhadap kualitas pendidikan apabila guru memperoleh sumber daya yang memadai, kesempatan untuk mengikuti pengembangan profesional, serta dukungan yang membantu penerapan kompetensi dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa dukungan lanjutan, sertifikasi berisiko hanya menjadi pemenuhan kualifikasi profesional tanpa diikuti perubahan yang berarti dalam praktik mengajar. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi dan dukungan sistem perlu menjadi bagian yang berkelanjutan dalam pelaksanaan sertifikasi agar kompetensi yang diperoleh dapat diterapkan secara optimal dalam pembelajaran.

Penerapan strategi tersebut perlu berlangsung secara berkelanjutan karena pengembangan kompetensi guru, dukungan lingkungan kerja, dan penerapan kompetensi dalam pembelajaran saling berkaitan. Ketika guru memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan didukung oleh lingkungan kerja yang memadai, kemampuan tersebut lebih memungkinkan untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Sebaliknya, keterbatasan dukungan dan kesempatan pengembangan dapat mengurangi penerapan kompetensi yang diperoleh melalui sertifikasi. Hubungan antarproses tersebut kemudian digambarkan dalam bentuk siklus pada Gambar 6.



Gambar 6. Siklus Keberlanjutan Sertifikasi Guru dalam Mendukung Kualitas Pembelajaran

Gambar 6 menunjukkan bahwa keberlanjutan manfaat sertifikasi juga dipengaruhi oleh dukungan yang diterima guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Ketersediaan sumber daya, kesempatan mengikuti pelatihan, dan beban administrasi yang proporsional dapat membantu guru lebih fokus pada kegiatan pembelajaran. Selain itu, kesejahteraan dan kondisi kerja perlu diperhatikan karena keduanya dapat berkaitan dengan motivasi dan kinerja guru. Dari perspektif implementasi kebijakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sertifikasi tidak hanya ditentukan oleh rancangan kebijakan, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya dan kesiapan pelaksana di lapangan (Van Meter & Van Horn, 1975). Oleh karena itu, dukungan bagi guru perlu dipertahankan setelah sertifikasi agar kompetensi yang telah diperoleh dapat terus dikembangkan dan diterapkan dalam proses pembelajaran.

Strategi tersebut memiliki kaitan dengan SDG 4, terutama Target 4.c yang menekankan pentingnya ketersediaan guru yang berkualifikasi serta kesempatan untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan (UNESCO & International Task Force on Teachers for Education, 2024). Dalam konteks sertifikasi guru, pencapaian target tersebut tidak cukup dilihat dari jumlah guru yang telah memperoleh sertifikat. Kualifikasi yang diperoleh perlu diikuti dengan pengembangan profesional secara berkelanjutan agar kemampuan guru tetap sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Oleh karena itu, pelaksanaan sertifikasi perlu dihubungkan dengan pelatihan lanjutan, supervisi, mentoring, dan evaluasi kualitas pembelajaran secara berkala. Langkah tersebut dapat membantu guru menerapkan kompetensi yang diperoleh dalam kegiatan pembelajaran sekaligus memberikan ruang untuk

memperbaiki praktik mengajar berdasarkan hasil evaluasi. Dukungan setelah sertifikasi juga perlu diberikan secara lebih merata agar kesempatan guru untuk mengembangkan kompetensinya tidak terlalu dipengaruhi oleh kondisi sekolah maupun wilayah tempat mereka bekerja. Dengan demikian, sertifikasi dapat ditempatkan sebagai bagian dari proses pengembangan profesional yang berkelanjutan, sehingga peningkatan kualifikasi guru tidak berhenti pada pemberian sertifikat, tetapi dapat berlanjut pada perbaikan kualitas pembelajaran dan mendukung pencapaian SDG 4.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis terhadap 10 artikel yang dikaji, sertifikasi guru belum menunjukkan keterkaitan yang konsisten dengan hasil belajar siswa. Manfaat sertifikasi lebih banyak terlihat pada perkembangan kompetensi dan profesionalisme guru yang selanjutnya dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi pendukung. Dukungan sekolah atau lembaga pendidikan, kesempatan mengikuti pelatihan, motivasi dan kesejahteraan guru, lingkungan kerja, serta ketersediaan fasilitas dapat membantu guru menerapkan kompetensi yang dimilikinya. Sebaliknya, beban administratif, ketimpangan antarwilayah, dan keterbatasan dukungan setelah sertifikasi dapat mengurangi manfaat kebijakan dalam praktik. Temuan ini menunjukkan bahwa sertifikasi perlu disertai pengembangan profesional yang berkelanjutan melalui kegiatan seperti supervisi, mentoring, dan evaluasi kualitas pembelajaran. Upaya tersebut dapat membantu peningkatan kualifikasi guru berkontribusi terhadap pencapaian SDG 4, khususnya Target 4.c. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mencakup 10 artikel dengan karakteristik dan metode penelitian yang beragam serta tidak menggunakan data empiris secara langsung. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan kajian dan menguji keterkaitan antara sertifikasi, kompetensi dan profesionalisme guru, praktik pembelajaran, serta hasil belajar dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi sekolah dan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bismo, P. A., Chozin, M. N., Adem, A. M. G., & Raisya, H. (2024). Is Double Salary Enough?: Examining Civil Servant Teachers' Welfare as the Effect of Teacher Certification Policy in Indonesia. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 139–153. <https://doi.org/10.21831/natapraja.v12i2.85381>
- Guo, Y., & Tian, G. (2026). How Does Teacher Certification Promote Student Achievement in Science, Reading, and Math? A Chain-Mediated Model of Teachers' Sense of Efficacy and Pedagogical Innovation. *Journal of Intelligence*, 14(01). <https://doi.org/10.3390/jintelligence14010002>
- Haesdhona, M. D., Chozin, M. N., Adem, A. M. G., & Muljawan, H. R. (2024). Policy Implementation Analysis: Examining the Effectiveness of Jambi's Teacher Certification Program. *Enigma in Education*, 2(2), 61–74. <https://doi.org/10.61996/edu.v2i2.75>
- Hajar, S., & Muhibin, A. (2026). Kebijakan Pendidikan dalam Bingkai Guru dan Dosen: Analisis Peningkatan Kompetensi dan Beban Administratif. *Pendidikan Islam Dan Budi Pekerti*, 8(1), 156–166. <https://doi.org/10.58194/pekerti/v8i1.7629>
- Hansen, K. Y., & Johansson, S. (2026). The Short- and Long-Term Impact of Teacher Formal Certification on Students' School Outcomes: A Propensity Weighting Approach. *Studies in Educational Evaluation*, 88, 101567. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2026.101567>
- Hardiyati, M., Putri, N., & Lubis, A. (2026). Civic Education and Nationalism Attitudes of Elementary School Students: Implications for Child Well-Being and SDGs in

- Indonesia. *Journal of Contemporary Gender and Child Studies*, 5(1), 408–416. <https://doi.org/10.61253/jcgcs.v5i1.546>
- Kamal, B. M., Kayani, S. A., & Bajwa, M. J. (2024). Evaluating the Influence of Teacher Certification on Educational Outcomes: A Systematic Review. *Journal of Development and Social Sciences*, 5(2), 830–841. [https://doi.org/10.47205/jdss.2024\(5-II\)75](https://doi.org/10.47205/jdss.2024(5-II)75)
- Kurniadi, T. (2025). Enhancing Teacher Quality in Indonesia: A Systematic Literature Review of the PPG Prajabatan Program Perspectives. *Langue (Journal of Language and Education)*, 3(2), 121–127. <https://doi.org/10.22437/langue.v3i2.43683>
- Lucksnat, C., Richter, E., Henschel, S., Hoffmann, L., Schipolowski, S., & Richter, D. (2024). Comparing the Teaching Quality of Alternatively Certified Teachers and Traditionally Certified Teachers: Findings from a Large-Scale Study. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 36(1), 75–106. <https://doi.org/10.1007/s11092-023-09426-1>
- Mohzana, & Zuana, M. M. M. (2025). Comprehensive Analysis of the Impact of Certification on Teacher Performance and Student Learning Achievement. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 251–266. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v6i2.1757>
- Mulyadi, M., Agustin, W., Nurhalimah, D., Latina, N., & Azizah, S. A. (2025). Evaluasi efektivitas kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru: Literatur review. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 10(4), 2535–2544. <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i4.1333>
- Mulyaningrum, V. D., Widodo, W., Lapasau, M., & Dewi, E. L. (2025). Strengthening Teacher Professionalism in the Digital Era: A Meta-Analysis of Digital Competence and Creativity as Drivers of Contextual Performance. *Jurnal Pendidikan Progresif*, 15(4), 2741–2759. <https://doi.org/10.23960/jpp.v15i4.pp2741-2759>
- Mutiara, E., Aw, S., Nuradiah, M. F., Faniyah, I., B, N. K. L., & Saputri, B. E. G. (2026). Evaluation of Inclusive and Multicultural Education Policies to Support the Achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) at Tumbuh Elementary School in Yogyakarta. *Journal of Educational Sciences*, 10(1), 1913–1936. <https://doi.org/10.31258/jes.10.1.p.1913-1936>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Priyono, U., Isjoni, & Bunari. (2024). The Effect of Teacher Professional Certification and Work Motivation on the Performance of Elementary School Teachers in the Kempas District, Indragiri Hilir Regency. *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 13(4), 153–158. <https://doi.org/10.33578/jpfkip-v13i4.p153-158>
- Putri, R. K. A., Kusaeri, K., & Rusdiah, E. F. (2025). The Impact of Large-Scale Continuing Professional Development on Teacher Professionalism in Indonesia and China: A Systematic Literature Review. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 17(3), 3990–4006. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v17i3.7542>
- Rahmi, I., & Rassanjani, S. (2025). Enhancing teacher quality in Indonesia: The impact of teacher professional development on achieving sustainable development goal 4.c. *Social Sciences and Humanities Open*, 12, 102123. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102123>
- Riau, D. P., Rulinawaty, Siswahyudi, D., & Muhtarom. (2024). Strategies for Implementing Building Operability Certificate to Improve Performance of Building Management: A

- Case Study in Probolinggo City, Indonesia. *The Scientific World Journal*, 2024. <https://doi.org/10.1155/2024/8749628>
- Sari, S. R., Hariri, H., Riswandi, Rusdiani, A., & Lada, S. (2026). Reconstructing Professional Identity: A Phenomenological Study of Teacher Certification and 21st-Century Learning. *Jurnal Pendidikan Progresif*, 16(1), 637–657. <https://doi.org/10.23960/jpp.v16i1.pp637-657>
- Sembiring, R., Danilwan, Y., Sofiyan, Sherly, & Sudirman, A. (2022). Analyzing the Mediation Impact of Teacher Job Satisfaction on Teacher Performance: The Role of Teacher Certification and Organizational Culture. *Jurnal Pendidikan Progresif*, 12(3), 1433–1452. <https://doi.org/10.23960/jpp.v12.i3.202233>
- Shahzad, K., Khan, S. A., Javed, Y., & Iqbal, A. (2023). E-Learning for Continuing Professional Development of University Librarians: A Systematic Review. *Sustainability*, 15(1), 849. <https://doi.org/10.3390/su15010849>
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, Pub. L. 14, Pemerintahan Republik Indonesia 2 (2005). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40266/uu-no-14-tahun-2005>
- UNESCO, & International Task Force on Teachers for Education, 2030. (2024). *Global Report on Teachers: Addressing Teacher Shortages and Transforming the Profession*. <https://doi.org/10.18356/9789231006555>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>